

BAB IV

ANALISA UPAYA AMERIKA SERIKAT MELAKUKAN DEMOKRATISASI DI IRAK DAN SURIAH

Pada bab IV ini penulis akan menganalisa penerapan *Peace Democracy Theory* dalam proses demokratisasi di Irak dan Suriah. Proses demokratisasi ini berlangsung ketika Arab Spring berkejolak di Timur Tengah. Irak dan Suriah merupakan dua Negara yang terkena dampak berkepanjangan dari adanya demokratisasi ini.

Dengan menggunakan kerangka pemikiran berupa konsep intervensi serta *Peace Democracy Theory* dalam menganalisis upaya Amerika Serikat dalam melakukan demokratisasi di Irak dan Suriah, penulis akan memaparkan apa saja upaya yang dilakukan Amerika Serikat dalam demokratisasi Irak dan Suriah. Dalam aplikasi teori yang sudah ada, penulis akan menggunakan *Peace Democracy Theory* sebagai dasar dalam menyelesaikan analisa upaya Amerika Serikat ini.

Dari pengaplikasian teori tersebut didapatkan jawaban sementara atau yang lebih dikenal dengan hipotesa sebagai berikut:

Terdapat beberapa peran Amerika Serikat dalam melakukan demokratisasi dalam *Arab Spring* di Irak dan Suriah melalui *Forward Strategy for Freedom in the Middle East*, dengan menggunakan:

1. Liberalisasi sipil
Memberikan ruang kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat serta pikiran dalam masyarakat Irak dan Suriah
2. Partisipasi politik sipil
Partisipasi politik masyarakat Irak dan Suriah seperti adanya perebutan kekuasaan antar etnis.

Gagasan dalam *democratic peace* telah memberikan sebuah warna tersendiri pada politik luar negeri Amerika Serikat. Demokratisasi digunakan sebagai satu cara agar untuk melegalkan intervensi yang dilakukan Amerika Serikat pada masa pemerintahan George W. Bush. Dengan dalih penyerangan sarang teroris, Bush mengeluarkan sebuah kebijakan luar negeri yang diberi nama *Forward Strategy for Freedom in the Middle East* sebagai perpanjangan tangan dari *democratic peace*. Keluarnya kebijakan ini disinyalir untuk meredam teroris yang menjamur di Timur Tengah.

Bahkan, melalui kebijakan ini Amerika melakukan *pre-emptive war* yang dilakukan untuk meruntuhkan Negara otoriter Irak.

Demokratisasi yang terjadi di Irak dan Suriah merupakan sebuah proses untuk mengganti sistem otoriter yang menjadi sistem pemerintahan di kedua Negara tersebut menjadi demokrasi. Penggantian sistem tersebut diyakini sebagai cara pengembalian kedaulatan kepada rakyat, sehingga rakyat tidak tertindas oleh pemerintahan. Berikut adalah penjelasan dari upaya Amerika Serikat dalam melakukan demokratisasi di Irak dan Suriah.

A. Liberalisasi Sipil di Irak dan Suriah

Democratic peace menjadi sebuah justifikasi dari *Bush Doctrin* atau Doktrin Bush yang dikeluarkan pasca kejadian 9/11. Amerika Serikat pada masa pemerintahan Bush mengaskan bahwa rezim Saddam Husein di Irak merupakan sebuah ancaman yang serius bagi Amerika Serikat. Bush mengatakan, bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal yang dapat digunakan kapan saja. Hal tersebut tentunya bukan hanya menakuti masyarakat Amerika Serikat saja, namun juga seluruh masyarakat dunia. Maka dari itu, Amerika Serikat melakukan agesi militer di Irak yang mengakibatkan jatuhnya rezim Saddam Husein .

Dalam pidatonya, Bush menekankan bahwa Negara-Negara yang menggunakan demokrasi dalam pemerintahannya tidak akan berperang dengan Negara demokrasi lainnya. Hal tersebut dikarenakan adanya kesamaan dalam aturan serta norma dalam pemerintahannya. Kecenderungan Negara demokrasi akan menyelesaikan permasalahan secara militer dengan Negara non-demokrasi. Maka dari itu, demokratisasi sangat harus dilakukan di Negara- Negara Timur Tengah.

Amerika Serikat melakuakn invasi besar- besaran ke Irak. Invasi yang dilakukan ini beralasan untuk melindungi warga Irak sendiri dari kejamnya pemerintahan Saddam Husein. Penyerangan ini ditujukan kepada pemerintahan. Akhirnya, hasil dari serangan ini adalah *keberanian* masyarakat untuk menentang pemerintah serta menyeruaknya kebebasan berpendapat masyarakat Irak.

Irak merupakan Negara yang belum siap menerima demokratisasi. Hal ini menyebabkan adanya anti-tesis dari

demokrasi itu sendiri. Rezim Saddam Husein diyakini lebih mengarahkan kebijakan- kebijakannya untuk mengantisipasi ancaman dari luar dengan cara melakukan penguatan kapasitas Negara. Demokratisasi yang dilakukan di Irak membuat adanya pergerakan massa di Irak. Massa memaksa pemerintahan Saddam Husein turun dari jabatannya. Pemerintahan yang otoriter menjadi penyebab rezim ini diturunkan. Ditambah lagi dengan keadaan masyarakat dengan tingkat perekonomian yang rendah serta korupsi yang tinggi. Sekitar tujuh juta penduduk Irak berada di bawah garis kemiskinan.

Rezim yang sangat korup memusnahkan harapan rakyat Irak untuk hidup sejahtera. Walaupun Irak terkenal dengan minyaknya yang melimpah, namun *hal* tersebut tidak membuat Irak dapat terlepas dari berbagai masalah perekonomian. Dorongan dari demokratisasi memaksa rakyat untuk turun ke jalan. Menyerukan berbagai keluh kesahnya dengan berbagai cara, termasuk melakukan demonstrasi sampai dengan sabotase. Seruan aksi ini bukan hanya dilakukan secara langsung, namun juga menggunakan media elektronik.

Seruan protes terhadap pemerintah berlangsung di berbagai kota. Sekitar 2.000 pengunjung rasa turun ke jalan serta berhasil mengambil alih gedung dewan Provinsi di Kota Kut. Tuntutan pengunjung rasa terhadap pemerintahan Provinsi tersebut tidak lain karena pemerintahan korup serta kemiskinan yang berada dibawah standar terjadi di Provinsi tersebut. Pengunjung rasa juga menduduki gedung- gedung *pemerintahan* di kota- kota besar seperti Baghdad dan Karbala. Para pengunjung rasa tersebut bukan hanya menuntut adanya pemberantasan korupsi serta penanggulangan kemiskinan saja, namun juga menuntut adanya keterlibatan pemerintah terhadap pelayanan publik adil dan mudah diakses oleh rakyat.

Dari sekian banyak tuntutan dari para pengunjung rasa ini, pemerintah Irak hanya menjanjikan adanya subsidi listrik saja. Pelayanan dasar yang *menjadi* kebutuhan primer rakyat Irak dikesampingkan begitu saja oleh pemerintah. Karena hal ini terus berlanjut, aksi demonstrasi kembali terjadi di Hawijah, Mosul dan Baghdad. Demonstrasi yang terjadi berujung konflik antara para demonstiran dan pihak pemerintahan.

Kejadian yang sama terjadi juga di Suriah. Ideologi Suriah pada awalnya tidak mengarah pada sikap otoriter, melainkan sosialisme islam. Pada masa Basyar Assad berbagai masalah muncul. Kebebasan media mulai dibatasi dengan diterbitkannya UU media pada tahun 2007. Bukan hanya itu, Basyar Assad juga memblokir situs website *pada* tahun 2011. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya provokasi terhadap demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Suriah.

Penangkapan beberapa pelajar di kota Deraa menjadi pemicu awal terjadinya konflik di Suriah.⁴⁴ Pada saat itu, sekitar 15 orang pelajar yang berumur dibawah 15 tahun menulis slogan- slogan anti pemerintah,⁴⁵ Slogan tersebut berbunyi “Rakyat sangat ingin rezim yang berkuasa untuk turun.”⁴⁶ Pemerintah mengira adanya protes yang dilakukan oleh anak-anak ini terinspirasi dari pergolakan massa yang terjadi di Mesir dan Tunisia.

Anak- anak yang terlibat dalam protes ini kemudian dipenjarakan oleh Jendral Atef Najib yang merupakan sepupu dari Presiden Bashir al- Assad. Para pelajar ini dipenjarakan kurang lebih selama satu bulan. Selama dalam penjara, mereka mengalami penyiksaan. Hal ini *diketahui* setelah para pelajar bebas dari penjara.

Mengetahui para pelajar tersebut mengalami penyiksaan selama ditahan, *maka* lahirlah gelombang protes yang lebih besar. Protes yang terjadi pada 11 Maret 2011 ini menuntut agar pemerintah membebaskan anak- anak yang telah dipenjarakan. Namun, reaksi yang diberikan dari pemerintah sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh para pemrotes. Sekitar 4 orang pemrotes meninggal karena ditembak oleh para polisi. Hal tersebut tentunya membakar amarah rakyat Suriah

⁴⁴ Stephen Starr, *Revolt in Syria: Eye-Witness to the Uprising*, 1st edn (London: Columbia University Press, 2012).

⁴⁵ Dina Y. Suleman, *Prahara Suriah Membongkar Persekongkolan Multinasional* (Depok: Pustaka Ilman).

⁴⁶ Siti Muti'ah, 'Pergolakan Panjang Suriah: Masih Adakah Pan-Arabisme Dan Pan-Islamisme', *CMES*, V (2012).

yang lain. protes semakin meluas dari kota Deraa ke kota-kota lainnya seperti Latakia serta Banyas di Pantai Mediterania.⁴⁷

Pada tanggal 23 Maret 2011, gelombang demonstran kembali menyerang kota Deera. Seperti yang telah terjadi sebelumnya, pasukan keamanan lagi-lagi melepaskan tembakan yang diarahkan kepada para *demonstran*. Pada kasus ini, diberitakan sekitar 20 orang demonstran meninggal karena tertembak. Dari insiden ini, Presiden Suriah, Bashar al-Assad mengumumkan bahwa pemerintahan mempertimbangkan untuk melakukan reformasi politik. Bukan hanya itu, Presiden Bashar juga menekankan akan menghapus hukum darurat yang telah dianut oleh Suriah selama kurang lebih 48 tahun lamanya. Namun, pengumuman dari Presiden tersebut justru tidak digubris oleh para tokoh oposisi juga rakyat Suriah yang sudah tidak percaya terhadap pemerintahan.

Demonstrasi kembali terulang pada 25 Maret 2011. Ketika setelah shalat Jum'at para demonstran melakukan aksi di seluruh kota. Pemerintah *mengerahkan* lebih banyak pasukan keamanan untuk membubarkan para demonstran. Namun, demonstrasi terjadi semakin intens.

Demonstrasi serta protes yang dilancarkan oleh pihak oposisi Suriah ini mendapat perlawanan bukan hanya dari para aparat pemerintah, namun *juga* dari rakyat yang pro terhadap pemerintah. Pada saat demonstrasi besar terjadi di Damaskus yang dilakukan oleh pihak pro-pemerintah untuk menunjukkan dukungannya terhadap pemerintahan Bashar al-Assad serta menyerang para oposisi.

Pemerintah Suriah mengumumkan pengunduran diri dari kabinet pada tanggal 29 Maret 2011. Hal ini ditunjukkan untuk memenuhi tuntutan para demonstran. Kemudian, sehari setelah diumumkannya pengunduran diri tersebut, Presiden Basyar Assad berani tampil didepan publik untuk yang pertama kalinya sejak konflik berkejolak di Suriah. Presiden Assad menyampaikan pidato untuk meredam emosi para demonstran. Dalam pidatonya tersebut, Presiden Assad menyebutkan adanya intervensi dari luar yang menyebabkan demonstrasi pecah serta

⁴⁷ Muti'ah.

konflik di Suriah. Selain itu, Presiden Assad juga mengakui adanya kekhawatiran yang ditimbulkan oleh para demonstran. Namun, Assad menolak adanya reformasi secara sekaligus di Suriah. Dia tetap berpegang teguh pada pendiriannya yakni melakukan reformasi secara bertahap. Sehingga dengan demikian esensi dari reformasi tersebut akan terasa oleh masyarakat *Suriah*. Setelah pidato tersebut disampaikan, media Suriah kemudian memberitakan bahwa telah dibentuk sebuah komisi untuk kemungkinan pencabutan hukum darurat oleh Basyar al-Assad.

Demonstrasi yang disambut kurang baik oleh pemerintah inipun berujung pada perang sipil. Banyak korban jiwa yang berjatuh dari *kedua* belah pihak. Perang sipil ini bukan hanya menggunakan senjata konvensional seperti biasanya dilakukan dalam perang- perang pada umumnya, namun menggunakan senjata kimia. Akibatnya, banyak rakyat Suriah yang terpaksa mengungsi bahkan menjadi imigran ke Negara lain agar tidak terkena dampak dari perang sipil ini.

Demonstrasi yang telah terjadi di seluruh Suriah menyebabkan meningkatnya angka kekerasan oleh para pasukan keamanan pemerintahan Suriah. Pasukan keamanan kembali menembaki para demonstran pada tanggal 8 April 2011 dan mengakibatkan *sedikitnya* 35 orang meninggal dunia. Diberitakan sekitar 200 orang meninggal dunia karena tertembak pasukan keamanan. Insiden ini kemudian memunculkan kecaman internasional. Negara- Negara pembela HAM serta organisasi internasional yang mengurus masalah HAM pun menyerukan adanya pemberhentian kekerasan.

Pemerintah Suriah menunjuk kabinet baru dan juga mencabut hukum darurat serta membubarkan Mahkamah Agung Keamanan *Suriah*. Namun, pengadilan digunakan hanya untuk mengadili para demonstran yang melakukan aksi menentang pemerintah. Pemerintah juga tetap berusaha mempertahankan pemerintahannya dengan berbagai cara untuk meredam emosi para demonstran. Dikeluarkan sebuah peraturan yang mewajibkan para demonstran memiliki ijin sebelum melakukan demonstrasi. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Menteri dalam

Negeri Suriah yang menyatakan bahwa demonstrasi akan terus dianggap sebagai ancaman keamanan nasional.

Setelah pencabutan hukum darurat, pasukan keamanan meningkatkan kekerasan terhadap para demonstran. Seperti yang terjadi pada tanggal 22 April 2011, sekitar 75 orang demonstran meninggal karena ditembaki oleh para pasukan keamanan ketika sedang berkumpul setelah shalat Jum'at. Ditengah kecaman internan internasional terhadap kekrasan serta pembunuhan yang terjadi, Suriah justru menambah kekuatan untuk membungkam para demonstran. Diturunkannya sejumlah besar pasukan yang dilengkapi senjata lengkap serta tank dan kendaraan lapis baja. Penurunan pasukan ini ditujukan untuk para demonstran yang semakin merajalela di kota Deraa, Homs, Baniyas serta berbagai kota yang dijadikan markas oposisi anti pemerintah. *Wilayah* ini juga diberlakukan pemadaman jaringan komunikasi, seperti matinya jaringan telepon dan jaringan internet. Di kota Deraa bahkan pemadaman merambat menjadi pemadaman listrik dan menghentikan pasokan air bersih.

Demonstrasi yang menyebar ke Damaskus ditangani dengan kekerasan. Para pasukan keamanan ini membentuk brikade dipinggiran kota Damaskus guna membatasi gerak para demonstran. Akibatnya, Uni Eropa melakukan penjatuhan sanksi terhadap Suriah yang berupa adanya pelarangan perjalanan bagi para pejabat pemerintahan Suriah. Bukan hanya melakukan pelarangan perjalanan saja, UE juga membekukan aset-aset para pejabat tersebut. Penerapan embargo senjata merupakan sanksi tambahan yang didapat Suriah dari Uni Eropa. Bukan hanya Uni Eropa saja yang melakukan dukungan terhadap para demonstran anti-pemerintah di Suriah, namun dukungan dari Negara lain pun berdatangan. Seperti yang dilakukan oleh Turki, sebuah konferensi dilakukan untuk para oposisi Suriah. Perdana Menteri turki pun mengutuk kekerasan yang dilakukan pemerintah Suriah terhadap warga sipil.

Bukan hanya para demonstran anti-pemerintah saja yang dihujani tembakan serta mendapatkan kekerasan, namun juga para tentara yang enggan menuruti apa yang Rezim Assad perintahkan ikut mendapatkan hal serupa. Sekitar 120 orang tentara dilaporkan tewas ditembaki karena menolak untuk

melakukan penyerangan kepada para demonstran. Para tentara ini dibunuh oleh pasukan pemerintahan. *Insiden* ini membuat pemerintah melancarkan serangan besar- besaran yang mengakibatkan ribuan masyarakat meninggalkan Suriah dengan cara melintasi perbatasan Turki. Kekerasan demi kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap para oposisi menyebabkan Rezim Assad mendapat kecaman dari dunia internasional dan dipaksa untuk mundur dari jabatannya selaku Presiden.⁴⁸

Dari pergerakan massa yang terjadi di Irak dan Suriah tersebut dapat dilihat bahwa demokratisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat *telah* menggunakan rakyat sipil sebagai alat untuk melancarkan kebijakannya di Timur Tengah. Pergerakan massa ini dilakukan untuk menurunkan elit atau memaksa elit yang berkuasa mengganti ideologi mereka menjadi demokrasi. Penanaman paham bahwa dengan demokrasi suara rakyat akan lebih didengar karena kedaulatan berada ditangan rakyat telah menjadi suatu dorongan untuk rakyat menurunkan rezim yang berkuasa.

Berikut adalah tabel perbandingan liberalisasi yang terjadi di Irak dan Suriah

⁴⁸ Fahham, A.

Tabel 3. Liberalisasi Irak dan Suriah 3

	Irak	Suriah
Liberalisasi Sipil	<p>Rezim yang korup dan juga pemerintahan yang bertindak otoriter memperburuk keadaan perekonomian di Irak yang kemudian menekan masyarakat Irak untuk melakukan demonstrasi guna menyampaikan keluhan serta keberatan atas pemerintah yang berkuasa. Dari demonstrasi ini masyarakat menginginkan rezim untuk turun yang kemudian ditanggapi dengan kekerasan yang dilakukan oleh pihak keamanan. Tindakan kekerasan ini kemudian membuat konflik berkepanjangan antara demonstran dan pihak pemerintah</p>	<p>Adanya penangkapan yang berujung dipenjarakannya 15 anak di bawah umur karena menuliskan slogan anti pemerintah. Anak-anak ini pun mengalami penyiksaan ketika berada dalam tahanan. Peristiwa tersebut menyebabkan masyarakat Suriah melakukan protes dengan cara turun ke jalan dan melakukan demonstrasi dengan tujuan membebaskan anak-anak tersebut. Namun aksi protes ini ditanggapi dengan perlakuan kekerasan dari aparat keamanan yang kemudian mengundang demonstrasi besar-besaran serta konflik berkepanjangan.</p>

Dari tabel tersebut dapat terlihat perbandingan liberalisasi sipil yang terjadi di Irak dan Suriah yakni adanya *pergerakan* massa karena masalah yang hampir sama. Keadaan ekonomi Irak yang buruk ditambah dengan merajalelanya korupsi serta

pemerintahan yang otoriter menjadi penyebab turunnya massa ke jalanan untuk menyerukan keluh kesahnya terhadap pemerintah. Namun sayang, aksi yang dilakukan oleh rakyat Irak ini justru ditanggapi dengan tidak baik. Aparat keamanan menembaki serta melakukan tindakan kekerasan untuk menghalau para demonstran. Akibatnya terjadilah konflik berkepanjangan antara demonstran dan pihak pemerintahan. Hal yang sama pun terjadi di Suriah, tatkala para petugas keamanan yang bertindak dengan menggunakan kekerasan dalam merespon demonstrasi yang terjadi di Suriah. Penangkapan 15 pelajar menyebabkan massa turun ke jalan untuk menyatakan protes serta tuntutan pembebasan terhadap pelajar *tersebut*.

Liberalisasi sipil yang dilakukan rakyat kedua Negara tersebut berawal dari sebab yang berbeda. Walaupun sudah terjadi partisipasi politik di *Irak* dan Suriah, namun demokratisasi yang terjadi dapat dikatakan gagal. Partisipasi rakyat Irak dan Suriah terhadap politik terlihat dari protes yang dilakukan untuk menuntut rezim yang berkuasa mengganti sistem yang berlaku dan menggantinya dengan demokrasi. Gagalnya demokratisasi ini diakibatkan oleh konflik berkepanjangan antara para demonstran dan pihak pemerintah. Hal ini kemudian membuktikan bahwa kedua Negara tersebut belum siap menerima demokrasi.

B. Partisipasi politik Sipil di Irak dan Suriah

Proses demokratisasi yang terjadi di Irak juga menggugah konflik antar etnis. Kelompok Kurdi dan Syiah merasa sangat diuntungkan dengan adanya proses politik di Irak, namun kelompok Sunni merasa dirugikan. Etnis Kurdi merasa diuntungkan dalam politik dan juga *budaya*. Hal ini dikarenakan Kurdi memenangkan pemilu dengan perolehan suara yang signifikan. Kemudian Syiah merupakan kelompok yang dominan dalam pemerintahan. Keadaan berbeda terjadi pada kelompok Sunni. Dimana pada awalnya Sunni merupakan kelompok yang menguasai pemerintahan, namun kini harus kehilangan kekuasaannya. Kondisi ini menjadikan adanya konflik antara ketiga etnis ini.

Kelompok pemerintahan meminta tentara Amerika untuk tetap berada di Irak dengan alasan keamanan. Hal tersebut tentu saja ditentang oleh kelompok Sunni. Mereka menginginkan Irak terbebas dari intervensi *Amerika* Serikat dan menjalankan kehidupan politiknya sendiri. Kelompok Sunni juga menuntut agar semua masalah Irak diselesaikan oleh internal tanpa adanya keterlibatan pihak luar. Selain itu, adanya tuntutan yang menghendaki proses politik Irak diikuti oleh seluruh elemen masyarakat. Bahkan mereka menuntut kelompok perlawanan untuk ikut serta dalam proses politik di Irak. Namun, tuntutan itu ditolak pemerintah disebabkan belum adanya kepercayaan pihak pemerintah *terhadap* kelompok perlawanan.

Terdapat *beberapa* kekuatan yang berasal dari elemen masyarakat, diantaranya:

1. Ulama- ulama Sunni dan Syiah
2. Lembaga keagamaan
3. Kelompok perlawanan

Menurut *The Economist*, sekitar 61 kelompok gerilyaman bersenjata masih ada bahkan sampai dengan pemerintahan Irak terbentuk. Kemudian *Wolfoiz* membagi kelompok perlawanan tersebut menjadi lima kelompok, yakni:

1. Teroris asing
2. Penjahat
3. Kriminal
4. Pendukung rezim Saddam Husein
5. Kelompok teroris dukungan Iran

Aliran politik yang ada di Irak tidak dapat dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, karena mereka memiliki ruang gerak yang terbuka serta penggunaan senjata yang bebas. Hal tersebut menjadikan kondisi pergolakan politik di Irak menjadi lebih dinamis. Aliran- aliran politik tersebut kemudian berafiliasi dengan partai- partai politik yang mempunyai kepentingan sendiri. Hal tersebutlah yang kemudian mengundang konflik berkepanjangan.

Konflik antar etnis yang berlangsung di Irak ini terus berkembang. Penyerangan dilakukan di tempat- tempat ibadah seperti masjid Syiah maupun Sunni. Bahkan penyerangan pun terjadi di rumah sakit serta fasilitas umum lainnya. Serangan

tersebut berbentuk bom bunuh diri, penculikan, perusakan fasilitas umum serta pemutusan aliran listrik.

Menyambung pengesahan konstitusi pertama Irak pada tahun 2004, serangan ganda menyerang kantor Partai Kurdi yang bertempat di Irbil. Kejadian ini menyebabkan sekitar 100 orang tewas. Kemudian bom bunuh diri pun terjadi di Karbala dan Baghdad pada saat perayaan keagamaan yang dilakukan oleh kelompok Syiah. Diberitakan dari kejadian ini 140 orang meninggal.

Adanya ketidakpuasan para kelompok milisi dengan hasil referendum disebabkan karena 78% rakyat Irak lebih memilih mendukung rancangan konstitusi. Hal tersebut kemudian menyebabkan adanya dua ledakan bom bunuh diri di Baghdad yang menewaskan 80 orang. Kejadian yang sama kemudian berulang di Karbala dan Ramadi yang merenggut korban jiwa sebanyak 110 orang.⁴⁹

Pengeboman yang terjadi di masjid Askariyah, Samarta menjadi bukti bahwa konflik etnis dan sectarian di Irak mencapai titik klimaks. Hal ini kemudian berpengaruh pada proses politik yang terjadi di Irak. Bom bunuh diri kembali terjadi menjelang pemilihan pejabat pemerintahan.

Konflik antar etnis di Irak ini merupakan salah satu bentuk proses dari *demokratisasi*. Hal ini dikarenakan para kelompok menuntut adanya pemenuhan dari setiap kepentingannya. Adanya pendudukan dari militer Amerika menunjukkan Amerika ingin melemahkan militer Irak, sehingga militer Irak tidak mampu mengendalikan keamanan dan terjadilah kekacauan yang berlanjut. Dari sisi lain, para kelompok ini menginginkan militer Amerika untuk segera meninggalkan Irak. Kelompok perlawanan beranggapan bahwa militer hanya dijadikan alat agar Amerika dapat mendominasi seluruh Irak.⁵⁰

Irak terdiri dari masyarakat *crosscutting cleavage* dalam etnis serta identitas agama. Kurdi bukanlah arab namun memiliki

⁴⁹ Michael C. Hudson, *Arab Politics : The Search for Legitimacy* (London: Yale University Press, 1997).

⁵⁰ Amien Rais, *Politik Dan Pemerintahan Di Timur Tengah* (Yogyakarta: PAU Studi Sosial UGM, 1987).

mayoritas Sunni, Syiah merupakan orang Arab yang berbeda sekte Islam dalam kehidupan beragamanya. Seharusnya, demokratisasi Irak dapat berpotensi mengurangi konflik serta membangun pluralitas rakyat Irak karena dapat mempermudah membangun kekuatan politik serta komunikasi politik. Namun, karena dijadikan alat untuk dapat menguasai pemerintahan maka yang terjadi adalah sebaliknya, yakni konflik berkepanjangan.⁵¹

Terdapat dua pola pergolakan kekuatan politik yang terjadi di Irak. Hal tersebut menggambarkan demokratisasi di Irak hanya bersifat procedural. Proses politik belum diikuti dengan stabilitas keamanan, namun justru memecah belah struktur keamanan dalam bermasyarakat juga *melmahkan* konstitusi bernegara. Kelompok sekte dan etnis yang kepentingannya tidak terwakili oleh pemerintah terus melakukan perlawanan. Peristiwa ini membuat stabilitas keamanan sulit diwujudkan.

Perang sipil juga terjadi di Suriah. Proses demokrasi yang terjadi di Suriah menjadi *pemicu* konflik sehingga menyebabkan peperangan. Masuknya beberapa pejuang jihad ke Suriah seperti al- Qaeda menjadi penyebab tambahan konflik di Suriah tidak kunjung mereda.

Perang sipil yang terjadi di Suriah ini disebabkan adanya perebutan kekuasaan antara rezim yang berkuasa, pihak oposisi serta kelompok jihadis. Berbagai cara dilakukan oleh rezim yang berkuasa untuk mempertahankan pemerintahannya. Bashar Assad telah membangun empat pilar yang terkenal juga sebagai pilar-pilar ayahnya dalam menjalankan pemerintahan. Keempat pilar tersebut yakni:

1. Kekuasaan pemerintahan berada di klan al- Assad
2. Menyatukan kaum minoritas
3. Pemerintahan mengontrol seluruh militer dan intelejen
4. Melakukan monopoli Partai Ba'ath

Pemerintahan Assad juga memberlakukan undang- undang darurat yang digunakan untuk membunkam para lawan politiknya. Bukan hanya itu saja, para oposisi yang dianggap mengganggu pemerintahan ditekan *perlawanannya* serta

⁵¹ Abraham Kaplan Harold D. Lasswed, *Power in Society: A Framework for Political Inquiry* (New Haven: Yale University Press, 1963).

ditindas. Kemudian pada tahun 2004, Assad juga mengerahkan kekuatan militer untuk menghentikan protes yang dilakukan oleh etnis Kurdi. Dampak dari aksi militer ini adalah ratusan nyawa melayang yang kemudian menyebabkan Suriah dikucilkan dari pergaulan internasional.

Kelompok penentang pemerintah harus melawan kelompok Hizbullah yang berasal dari Lebanon. Hal ini dikarenakan pemerintahan Suriah didukung oleh Syiah yang juga merupakan etnis yang menguasai Hizbullah. Para militan syiah ini berjanji tidak akan tinggal diam apabila kelompok aliansi yang berada di Damaskus mengalami penyerangan. Bahkan pemimpin Syiah Hizbullah *menekankan* bahwa anggota Hizbullah akan terus mempertahankan Suriah dari para ekstrimisme Islam.

Kelompok oposisi Suriah membentuk *Free Syrian Army* dan kemudian menguasai wilayah Aleppo serta bagian selatan dari Suriah. Kemudian dengan berjalannya waktu, oposisi Suriah ini pecah *menjadi* dua, yakni kelompok oposisi yang bertahan dengan politik moderat asli dan kelompok yang mengejar visi Islam untuk Suriah yang dikenal dengan ISIL.

Demokratisasi membuat kelompok oposisi di Suriah meyakini bahwa tidak ada cara lain untuk dapat menurunkan rezim yang berkuasa *selain* demokrasi. Adanya bantuan dari Amerika juga terhadap salah satu etnis juga merupakan bagian untuk memperkuat upaya masuknya demokrasi dan menghambat masuknya komunis di Timur Tengah. Hal ini dikarenakan adanya campur tangan Rusia terhadap kelompok pemerintahan di Suriah.

Politik sipil di Irak dan Suriah: Berikut adalah tabel perbandingan terjadinya partisipasi

Tabel 4. Partisipasi Politik Sipil Irak dan Suriah

	Irak	Suriah
Partisipasi politik Sipil	Terjadinya perebutan kekuasaan antara Kurdi, Syiah dan Sunni. Sunni merasa menjadi minoritas ketika Kurdi dan Syiah dominan dalam pemerintahan. Hal ini menjadikan adanya konflik antara Syiah dan Sunni.	Terdapat tiga kelompok besar yang menginginkan pemerintahan Suriah. Ketiga kelompok tersebut adalah pihak pemerintahan, pihak oposisi serta kelompok jihadis. Terjadi konflik antara ketiga kelompok ini. Masing- masing kelompok menginginkan Suriah berjalan sesuai dengan ideologi mereka.

Dari tabel tersebut terlihat adanya partisipasi politik dari keterlibatan kelompok- kelompok tersebut dalam proses demokratisasi. Hanya saja, demokratisasi yang terjadi di Irak dan Suriah kembali dikatakan gagal karena *kelompok-* kelompok tersebut memasukan kepentingannya ke dalam partai politik. Sehingga hadirnya partai politik hanya sebagai penampung kepentingan kelompok tertent. Akibatnya, konflik terjadi antara kelompok yang menginginkan kepentingannya tercapai.